



PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

2025

RENCANA

KERJA TAHUNAN

DINAS KETAHANAN PANGAN



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU
TAHUN 2025**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU**

BELOPA, 2024



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah untuk menyiapkan rencana kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2025. Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi serta sebagai landasan utama dalam penyusunan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berperan aktif dan memberi masukan dan saran, sehingga Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita.

Belopa, Juli 2024

KEPALADINAS,

MAKKAWARU, S.E., M.M.

Pangkat: Pembina

NIP. 19740707 2008 1 014





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	3
Maksud dan Tujuan	8
Maksud.....	8
Tujuan	8
Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PANGAN	10
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra 2019-2024	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DKP Kab. Luwu Tahun 2019 - 2024...	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP Kab. Luwu.....	28
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN.....	49
3.1. Tujuan	49
3.2. Sasaran Renja DKP Kab. Luwu.....	49
3.3. Program dan Kegiatan DKP Kab. Luwu.....	52
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	54
4.1. Rencana Kerja	54
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	54
BAB 5. PENUTUP.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab Luwu dan Proyeksi Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2023	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu	23
Tabel 2.4.	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025	38
Tabel 2.5.	Usulan Proram dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu	48
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Urusan Pangan Tahun-2025.....	51
Tabel 3.2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Non Urusan Tahun 2025.....	51
Tabel 4.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	55



Bab 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana pembangunan urusan pangan tahun 2025 yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan ini yang disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 11, menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 273 menyatakan Rencana Strategis dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026 berawal pada tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025.



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Renja DKP Kab. Luwu Tahun 2025 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber



pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan Renja : 1) penggalan masalah dan potensi; 2) pembahasan lingkup Dinas Ketahanan Pangan; 3) Pembahasan bersama pakar; 4) Penyusunan *cascading*; 5) Verifikasi awal oleh Bappeda; 6) Forum Perangkat Daerah; 7) Penyempurnaan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-





- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/ 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu 2005 - 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024;
38. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
39. Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Kabupaten Luwu;
40. Keputusan Bupati Luwu Nomor 399/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu
41. Keputusan Bupati Luwu Nomor 228/V/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Luwu.
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019. Kasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021





tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

44. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2025 disusun dengan maksud:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah urusan pangan tahun 2025;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah urusan pangan tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2025;
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan, pengawasan pembangunan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

- Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pangan. Bab ini memaparkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; permasalahan pembangunan daerah; isu strategis





pembangunan ketahanan pangan; reviu terhadap rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran

Memuat telaah kebijakan nasional, kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tujuan dan sasaran perangkat daerah; serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat uraian rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2025.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.



Bab 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PANGAN

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2019 - 2024

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu diperlukan evaluasi tahunan atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Mengingat Renja Tahun 2024 adalah tahun kelima penjabaran Renstra periode Tahun 2019 – 2024, sehingga yang dievaluasi dalam Renja Tahun Anggaran 2024 adalah Renstra periode 2019-2024. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu yang dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu
dan Proyeksi Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= 10/4
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN UMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi	3.500	6.103	3.475	7.590	218	3.500	6.200	177,14
2	9	2	2.01		Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	63	23	0	0	0	0	23	36,51
2	9	2	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	63	23	0	0	0	0	23	36,51
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Energi	2.250	2.060	2.350	1823	77,57	2.300	2100	93,33
						Angka Konsumsi Protein	71	60,68	61,50	51,60	83,90	61,75	61,75	86,97
2	9	3	2.01		Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok Beras	3	2,50	4,0	5,2	76,92	4	3,7	81,08
2	9	3	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Center yang Ditumbuhkembangkan	1	0	0	0	0,00	1	1	100
2	9	3	2.01	0010	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	18	5	8	8	100,00	0	13	72,22

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	9	3	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	60	36	12	12	100,00	12	60	100
2	9	3	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Neraca Bahan Makanan	4	2	2	2	100,00	2	4	100
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	91,59	9,25	0	0	0,00	26,81	26,81	100
2	9	3	2.02	0003	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (ton)	80	9,25	0	0	0,00	26,81	26,81	33,51
2	9	3	2.02	0004	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang terpeliharai	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Energi dan Protein	2.250	2.060	2.350	1823	77,57	2.300	2100	93,33
							71	60,68	61,50	51,60	83,90	61,75	61,75	86,97
2	9	3	2.04	0001	Penyusunan dan Penetaan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	4	0	1	1	0,00	0	0	25,00
2	9	3	2.04	0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekeagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	143	20	0	0	100,00	1	21	14,69
2	9	3	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4	0	1	1	0,00	0	0	25,00
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Rawan Pangan	5	4	4	4	125,00	4	4	100,00
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tersedia	2	1	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	9	4	2.01	0001	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang dimutakhirkan	2	1	0	0	0,00	0	0	0,00
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Jumlah jenis kerawanan pangan yang ditangani	16	4	4	4	100,00	4	12	75,00
2	9	4	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota	5	4	1	1	100,00	1	1	100
2	9	4	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	16	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	70	52,27	100	100	100,00	0	NA	NA
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	200	125	50	50	100,00	50	50	100,00
2	9	5	2.01	0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8	2	0	0	0,00	0	2	25,00
2	9	5	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	9	5	2.01	0007	Penyediaan saran dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar yang diuji tingkat keamanannya	200	50	50	50	100,00	0	100	50,00
2	9	5	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	8	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Peaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	97,34	100	100	100,00	100,00	100	100,00
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
2	9	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	4	2	2	100,00	2	8	100,00
						Forum Perangkat Daerah	3	1	0	0	100,00	0	1	33,33
2	9	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA yang disusun	4	2	1	1	100,00	1	4	100,00
2	9	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA yang disusun.	4	2	1	1	100,00	1	4	100,00
2	9	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA yang disusun	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00
2	9	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang disusun	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00
2	9	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	4	2	1	1	100,00	1	4	100,00
2	9	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	8	0	0	0,00	4	12	75,00
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen administrasi keuangan secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	9	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	30	15	15	100,00	18	63	105,00
2	9	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD .	4	2	1	1	100,00	1	4	100,00
2	9	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	30	15	15	100,00	15	60	100,00
2	9	1	2.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi ba rang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
2	9	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang ilik Daerah pada SKPD	8	4	2	2	100,00	2	8	100,00
2	9	1	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan BMD	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
						Laporan Pelaksanaan Penatausahaan BMD	8	2	0	0	0,00	0	2	25,00
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen administrasi kepegawaian secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
2	9	1	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paet pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	660	55	0	0	0,00	0	55	8,33
2	9	1	2.05	0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	8	10	8	8	100,00	8	26	325,00
2	9	1	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	1	0	0	0,00	0	1	12,5
2	9	1	2.06		Administrasi umum perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
2	9	1	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	89	9	0	0	000	0	9	10,11

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	9	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48	24	12	12	100,00	12	48	100,00
2	9	1	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	24	12	12	100,00	12	48	100,00
2	9	1	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	24	12	12	100,00	12	60	100,00
2	9	1	2.06	0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan..	36	12	12	12	100,00	12	36	100,00
2	9	1	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240	91	24	24	100,00	12	12	52,92
2	9	1	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	1149	387	160	360	225,00	79	79	71,89
2	9	1	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	9	1	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
2	9	1	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas /Operasional yang Diadakan	4	0	0	0	0	0	0	0,00
2	9	1	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
0	0	0	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah register surat keluar	1700	819	0	0	0,00	0	819	48,18
						Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	84	12	0	0	0,00	0	12	14,28
2	9	1	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik yang disediakan	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	9	1	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.818	1.112	300	300	100,00	276	240	90,87
						Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	36	12	12	100	12	60	100
2	9	1	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana/aparat dalam kondisi baik	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
2	9	1	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan	99	22	25	16	63,16	18	65	65
						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang memiliki perizinan	15	19	1	1	100,00	2	22	146,67
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	123	30	3	15	500,00	4	49	39,84
2	9	1	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	224	46	26	26	100,00	25	97	43,30
2	9	1	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	703	28	0	0	0,00	0	28	3,98



Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.296.995.293,- terserap sebesar Rp. 3.269.692.590,- atau 99,17 % dengan Sisa anggaran sebesar Rp. 27.302.703,- berasal dari efisiensi kegiatan.

Adapun rincian pelaksanaan Program dan Kegiatan DKP Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.188.904.043	3.161.769.770	99,15
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.355.860	16.355.860	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.101.210	4.101.210	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.893.290	2.893.290	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.695.950	2.695.950	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.363.310	1.363.310	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.036.200	2.036.200	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.265.900	3.265.900	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.634.897.593	2.611.986.493	99,13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.506.998.243	2.484.087.143	99,09
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.860.000	109.860.000	100,00



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.108.000	5.108.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.931.350	12.931.350	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.007.610	4.007.610	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.007.610	4.007.610	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.616.050	5.616.050	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.616.050	5.616.050	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.516.380	263.479.710	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.696.300	2.696.300	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.655.780	8.655.640	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	18.353.800	18.344.060	99,95
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.986.500	3.986.500	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.824.000	220.797.210	99,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.839.550	216.850.047	99,55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.573.200	19.583.697	95,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.266.350	197.266.350	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.671.000	43.474.000	93,15



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	(%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.300.000	38.103.000	92,26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.371.000	5.371.000	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	58.323.850	58.160.050	99,77
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	42.548.340	42.434.540	99,73
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.477.200	9.428.400	99,49
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	19.235.200	19.235.200	100,00
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	13.835.940	13.770.940	99,53
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	15.775.510	15.725.510	99,68
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.991.510	10.991.510	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4.784.000	4.734.000	98,95
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	26.442.400	26.437.770	94,57
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.442.400	26.437.770	99,98



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	(%)
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.442.400	26.437.770	99,98
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.325.000	23.325.000	100,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	23.325.000	23.325.000	100,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23.325.000	23.325.000	100,00
JUMLAH		3.296.995.293	3.269.692.590	99,17

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja dan anggaran yaitu:

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
2. Ketersediaan pangan utama yang meningkat seiring dengan meningkatnya produksi beras di Kabupaten Luwu,
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024

Pengukuran kinerja pelayanan DKP Kab. Luwu dilaksanakan melalui evaluasi kinerja Tahun 2019 – 2024. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.2. Berdasarkan data pada Tabel 2.2. dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu dari seluruh indikator kinerja *outcome* tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori



Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2025



Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan					RealisasiCapaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Angka Ketersediaan Energi(AKE)	√		3,400	3,425	3,450	3,475	3,500	6.132	6.103	7590	6.000	6.137	
	Angka Ketersediaan Protein(AKP)	√		67	70	70	70	71	180	181	203	170	182	
2	KetersediaanPanganUtama(Kg/kapita/thn)	√	√	673,95	687,76	701,91	716,42	731,69	845,75	824,21	785,41	731,69	830,21	
3	PenangananDaerahRawanPangan(SkorKomposit)	√		9	8	7	6	5	5	5	5	5	4	
4	Persentase ketersediaaninformasi pasokan, hargadanaksespangan(%)	√		100	100	100	100	100	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	
5	Jumlahcadanganpanganpemerintahdaerah(ton)	√		20	40	60	80	100	20,84	9,25	0	13,46	23,66	
6	SkorPolaPanganHarapan(PPH)Konsumsi(%)	√		88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	78,8	78,0	81,2	83,0	90,05	
7	TingkatKeamananPanganSegar yangDiuji(%)	√		50	55	60	65	70	96	52,7	100	100	100	
8	JumlahRegulasiKetahanan PanganyangTersusun(Dokumen)		√	8	8	8	8	2	0	1	0	1	1	



1. Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan Angka Ketersediaan Protein (AKP)

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Luwu dari Tahun 2021 – 2022, ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Luwu yang dihitung dari data produksi, keluaran dan pemasukkan pangan serta penggunaan untuk non pangan telah melebihi angka rekomendasi ketersediaan pangan per kapita hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, yaitu ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi tahun 2022 sebesar 6.103 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 181 gram/kap/hari. Sedangkan Ketersediaan Energi Pada tahun 2023 adalah sebesar 7.590 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 203 gram/kapita/hari. Terlihat bahwa terdapat Kenaikan AKE sebesar 24,73 persen, sedangkan AKP juga mengalami peningkatan dari 181 gram/kap/hari menjadi 203 gram/kap/hari Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan dayabeli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersedian Pangan Utama (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023 cenderung menurun. Ketersedian Pangan Utama pada tahun 2022 sebesar 824,21 kg/kapita/tahun atau (750,17 %), sedangkan pada tahun 2023 Persentase Ketersediaan Pangan Utama sebesar 785,41 kg/kapita/tahun (713,67 %). Produksi Beras pada tahun 2023 adalah 167.602 ton (Sumber ; Data BPS) bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Luwu (40.957 ton), maka ketersediaan atau stok beras dalam kategori surplus hingga mencapai 126,645 ton pada tahun 2023 Dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu berkoordinasi dengan instansi teknis terkait bukan hanya dalam pencapaian target ketersediaan pangan





utama (beras) tetapi juga ketersediaan bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, daging, susu, telur, ikan, gula, sayur, buah, dan lain-lain. Dengan demikian, pangan yang tersedia di Kabupaten Luwu bukan hanyamencukupi namun juga beragam.

3. Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu dilakukan dengan memperhatikan kejadian rawan pangan suatu wilayah baik transien maupun kronis. Pada Tahun 2022, Penanganan Daerah rawan pangan dengan target skor komposit adalah 7 dengan realisasi skor komposit hasil analisis situasi kerawanan pangan dan gizi kabupaten luwu adalah 5 (waspada), sedangkan tahun 2023 target skor komposit adalah 6 dan realisasi skor komposit dari hasil analisis situasi kerawanan pangan dan gizi kabupaten luwu tahun 2023 dari tiga indikator yaitu Aspek Ketersediaan, Aspek Akses Pangan, dan Aspek Pemanfaatan adalah berada dalam situasi Waspada (5).

4. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh enumerator untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan. Target komoditas yang dipantau sebanyak 24 komoditas dengan target waktu selama 52 minggu.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan terjangkau masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pada tahun 2022 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan sebesar 66,67 %, sedangkan pada tahun 2023 Persentase Ketersedian Informasi Pasokan, Harga dan akses Pangan masih pada angka sebesar 66,67 %.

5. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2022 sebesar 9,25 ton beras. Jika dibandingkan dengan jumlah cadangan pangan pemerintah pada





tahun 2021 adalah sebesar 20,84 ton, terlihat bahwa ada penyaluran CPP pada tahun 2022 sebesar 11,595 ton sehingga jumlah CPP pada tahun 2022 adalah sisa sebesar 9,25 ton. Jika didasarkan pada target tahun 2022 sebesar 100 ton maka masih ada *gap* sebesar 90,75 ton untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan. Stok awal Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah 9,25 dan terdapat penyaluran cadangan pangan pemerintah sebesar 9,25 ton sehingga stok akhir cadangan Pangan Pemerintah tahun 2023 habis, dan tidak adanya alokasi anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

6. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH Kabupaten Luwu pada tahun 2023 88,1 % atau masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 92,5 %. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (skor PPH) terdapat kenaikan sebesar 10,1 persen.

7. Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kondisi keamanan pangan segar dari aspek cemaran mikroba ditemukan contoh pangan segar yang tidak memenuhi syarat. Pada



tahun 2018, jumlah total contoh yang diujikan sebanyak 22 contoh dan 2 contoh (10%) diantaranya terhadap TMS atau mengandung cemaran mikroba *E. coli* di atas batas maksimum yang diizinkan. Jenis komoditi yang tercemar tersebut adalah jenis sayuran kangkung. Cemaran *E. coli* terkait erat dengan praktek sanitasi dan hygiene pada proses produksi, penanganan pasca panen, dan distribusi. Jenis sayuran kangkung yang beredar di tingkat pedagang ini harus menjadi perhatian bersama. Cemaran *E.coli* ini mengindikasikan penanganan pangan segar dari hulu (kebun) sampai hilir (pedagang retail) belum menerapkan praktek sanitasi dan *hygieneyang* benar.

Kondisi keamanan pangan dari aspek cemaran logam berat (Cadmium Cd dan timbale Pb) sebagian besar tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah contoh yang diujikan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 15 contoh. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018, jumlah contoh yang diujikan masing-masing 20 dan 22 contoh. Dari contoh pangan segar yang 016 sampai diujikan sejak tahun 2 dengan 2018 menunjukkan hasil bahwa sebagian besar contoh terdeteksi kadar logam berat. Dari sebagian besar logam berat yang terdeteksi tersebut, kadarnya di atas ambang batas. Standar yang digunakan adalah SNI 7387 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat. Jumlah contoh pangan segar yang terdeteksi logam beratnya meningkat sejak tahun 2016 hingga 2018.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengujian sampel pangan dengan menggunakan metode *rapid test* di enam pasar tradisional dengan uji coba kandungan chlorine didapatkan hasil bahwa semua sampel bebas dari cemaran kandungan Chlorine. Pada tahun 2020 telah dilakukan pula pengujian sampel dengan menggunakan metode yang sama yaitu *rapid test* di delapan pasar tradisional dengan uji kandungan residu pestisida, logam berat (Pb dan Hg) didapatkan hasil bahwa semua sampel bebas dari cemaran residu pupuk dan logam berat. dan pada tahun 2021 telah dilakukan pengujian sampel dengan metode *rapid test* di 11 (sebelas) pasar tradisional dengan 50 sampel PSAT dengan uji kandungan residu pestisida dan logam berat (Hg, Pb, As) didapatkan hasil bahwa 8 sampel mengandung residu pestisida dan logam berat.

Pada tahun 2022 tidak dilakukan Pengujian Sampel karena Keterbatasan Anggaran sedangkan pada tahun 2023 telah dilakukan pengujian sampel dengan metode



rapid test di 11 (sebelas) pasar tradisional dengan 18 sampel PSAT dengan uji kandungan residu pestisida dan logam berat (Hg, Pb, As) didapatkan hasil bahwa semua sampel bebas dari cemaran residu pestisida pupuk dan logam berat.

Namun perlu disadari bahwa metode *rapid test* ini tidak dijadikan acuan dalam mengetahui kondisi keamanan pangan. Metode yang akurat adalah dengan menggunakan uji laboratorium, namun sarana dan prasarana yang tidak mendukung serta dukungan anggaran yang tidak mencukupi maka metode yang digunakan adalah metode *rapid test*. Ini menjadi perhatian serius bagi dalam penanganan pangan di kabupaten luwu karena ini menyangkut asupan sehari-hari makanan masyarakat kabupaten luwu dan bila dibiarkan akan berakibat fatal pada kesehatan masyarakat luwu.

8. Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan yang Tersusun.

Regulasi terkait Ketahanan pangan yang telah disusun pada tahun 2022 yaitu Peraturan Bupati Luwu Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu (DKP Kab. Luwu) diatur dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu.

DKP Kab. Luwu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DKP Kab. Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DKP Kab. Luwu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Luwu. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:





1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
3. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
8. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi





turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga halpokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Luwu.

2. Produksi dan Ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Luwu secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Luwu. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

3. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4. Rawan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Luwu masih cukup tinggi





diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

5. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Saat ini masih adanya kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

7. Stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena





: (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan

pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang. Informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

Peningkatan pelayanan DKP Kab. Luwu dalam penyelenggaraan urusan pangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya





adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3. Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Kabupaten Luwu harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Kabupaten Luwu juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan





bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Kabupaten Luwu untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas.

4. Permasalahan Gizi (*Malnutrition*)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan *overweight* dan obesitas.

5. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Kabupaten Luwu akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan





cita rasa memuaskan mulut, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Kabupaten Luwu
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
3. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Kabupaten Luwu memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPd

Berdasarkan hasil reviu terhadap rancangan awal RKPd, semua program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPd semuanya diakomodir ke dalam Renja, namun mengingat keterbatasan





anggaran kemungkinan terdapat program dan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kemungkinan terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Renja ke RKA, adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat terlihat pada tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.4.
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu
Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Ketersediaan Energi	6.137	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Ketersediaan Energi	6.137	-	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun		-	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun		-	
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		-	
B	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Tingkat Konsumsi Energi	109,52 % (2.300 kkal/kpt/hr)	495.707.252	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Tingkat Konsumsi Energi	109,52 % (2.300 kkal/kpt/hr)	495.707.252	
			Tingkat Konsumsi Protein	108,77% (62,00 gram/kpt/hr)				Tingkat Konsumsi Protein	108,77% (62,00 gram/kpt/hr)		
			Rasio Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan	6,02				Rasio Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan	6,02		

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	65	210.042.894	Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	65	210.042.894	
1	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Luwu	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4	12.460.191	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Luwu	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4	12.460.191	
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Luwu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150	50.829.858	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Luwu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150	50.829.858	
3	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	23.435.632	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	23.435.632	
4	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Luwu	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	49.753.119	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Luwu	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	49.753.119	
5	Pemantauan Stok Pangan	Kab. Luwu	Informasi Stok Pangan	12	10.048.627	Pemantauan Stok Pangan	Kab. Luwu	Informasi Stok Pangan	12	10.048.627	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1	12.043.903	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1	12.043.903	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Luwu	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	40.019.357	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Luwu	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	40.019.357	
8	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Belopa, Kab. Luwu	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	11.452.207	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Belopa, Kab. Luwu	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	11.452.207	
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	23,66	221.347.934	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	23,66	221.347.934	
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	13,45	199.997.934	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	13,45	199.997.934	
2	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10,00	21.350.000	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10,00	21.350.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Luwu	Tingkat Konsumsi Energi	109,52%	64.316.424	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Luwu	Tingkat Konsumsi Energi	109,52%	64.316.424	
			Tingkat Konsumsi Protein	108,77%				Tingkat Konsumsi Protein	108,77%		
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Luwu	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	16.644.880	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Luwu	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	16.644.880	
2	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Luwu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	42.011.544	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Luwu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	42.011.544	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Luwu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	5.660.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Luwu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	5.660.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Desa atau Kelurahan Tahan Pangan	80,27	72.263.708	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Desa atau Kelurahan Tahan Pangan	80,27	72.263.708	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tersedia	-	-	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tersedia	-	-	
1	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Belopa, Kab. Luwu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	-	-	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Belopa, Kab. Luwu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	-	-	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Kerawanan Pangan yang ditangani	4	72.263.708	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Kerawanan Pangan yang ditangani	4	72.263.708	
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	20.281.288	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	20.281.288	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	9.052.733	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	9.052.733	
3	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Luwu	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	33.537.672	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Luwu	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	33.537.672	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	9.392.015	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	9.392.015	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	100	29.463.492	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	100	29.463.492	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	50	29.463.492	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	50	29.463.492	
1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	5.888.492	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	5.888.492	
2	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	23.575.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	23.575.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belopa, Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.386.011.302	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belopa, Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.386.011.302	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun.	8	26.238.138	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun.	8	26.238.138	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5.229.614	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5.229.614	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.992.873	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.992.873	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.883.489	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.883.489	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.267.553	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.267.553	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.004.674	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.004.674	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3.429.790	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3.429.790	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	6.430.145	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	6.430.145	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	8	2.804.340.948	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	8	2.804.340.948	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	2.639.474.968	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	2.639.474.968	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	145.270.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	145.270.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.076.033	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.076.033	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	14.519.947	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	14.519.947	
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1	5.344.917	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1	5.344.917	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	5.344.917	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	5.344.917	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	1	19.729.116	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	1	19.729.116	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51	8.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51	8.700.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	5.529.116	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	5.529.116	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	5.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	5.500.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Pangkat Daerah	10	228.136.933	Administrasi umum perangkat daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Pangkat Daerah	10	228.136.933	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1.348.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1.348.900	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	2.002.140	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	2.002.140	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4.554.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4.554.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	7.827.732	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	7.827.732	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	9.000.000	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan Bahan/Material	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	16.977.161	Penyediaan Bahan/Material	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	16.977.161	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	182.427.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	182.427.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2	22.170.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2	22.170.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	
2	Pengadaan Mebel	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	3.000.000	Pengadaan Mebel	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	3.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	15.170.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	15.170.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	4.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	4.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	2	219.973.400	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	2	219.973.400	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	25.573.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	25.573.400	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	194.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	194.400.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	32	60.077.850	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	32	60.077.850	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	49.013.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	49.013.850	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	3.765.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	3.765.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7.299.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7.299.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme Penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proposal usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke SKPD, dibandingkan pada saat forum musrembang, dan untuk Tahun 2024 tidak ada usulan program/kegiatan Ketahanan Pangan dari masyarakat melalui Forum Musembang.

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Luwu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

N0	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



Bab 3

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGANKAB. LUWU

3.1. Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu adalah meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Luwu, dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Penilaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu menggunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas daerah dan intervensi program.

Dipilihnya indikator IKP karena nilai yang dihasilkan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP juga memiliki tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi serta data yang digunakan untuk menyusun IKP tersedia secara rutin dalam periode tertentu.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh DKP Kab. Luwu. Sasaran DKP Kab. Luwu adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan indikator Angka Ketersediaan Pangan Utama, Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen untuk komoditi beras dan cabe, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas, kualitas dan tata kelola Keuangan Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan indikator Predikat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DKP Kab. Luwu dari Inspektorat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Bab III Rencana Kerja ini, DKP Kab. Luwu menetapkan indikator sasaran dan tujuan beserta targetnya sebagai tolak ukur pencapaian kinerja tahun anggaran 2025, sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.1 dan 3.2.2



Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Urusan Pangan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	90,0
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/thn)	830,21
			Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok Strategis di Tingkat Konsumen (%)	
			- Beras	≤3
			- Cabe Merah	≤15
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	90,5

Tabel 3.2.2. Tujuan dan Sasaran Non Urusan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah	BB



3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan ditetapkan prioritas pembangunan ketahanan pangan Tahun 2025, yaitu melalui 3 (empat) program utama, yaitu

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Sedangkan untuk non urusan melalui program berikut ini:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan nomenklatur kegiatan yang didasarkan pada kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2025 – 2026. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan:

- 1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi



3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Bab 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 4 Program dengan 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra DKP Kab. Luwu Tahun 2025-2026.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2025 pada DKP Kab. Luwu direncanakan sebesar **Rp. 3.983.445.433,00** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pajak Daerah dan DBH.



Tabel 4.2.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab.
Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS KETAHANAN PANGAN			3.983.445.433,00				4.718.018.330,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.983.445.433,00				4.718.018.330,00
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.983.445.433,00				4.718.018.330,00
1,	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.470.438.695,00			-	3.769.252.301,00
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.246.743,00			8 Dokumen	34.689.338,00
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	4.732.114,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	3 Dokumen	13.479.614,00
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	4.991.450,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	3.992.873,00

	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	370,00	3.459.	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	9,00	2.883.48
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	657,00	2.677.	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	3,00	2.267.55
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	064,00	2.413.	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	4,00	2.004.67
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	604,00	3.023.	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Laporan	0,00	3.629.79
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	5.949.484,00		Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	4 Laporan		6.431.345,00
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.838.875.858,00				8 Jenis		2.858.030.447,00

	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	336 Orang/bulan	2.677.812.188,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	336 Orang/bulan	2.692.264.467,00
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	145.270.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	12 Dokumen	145.270.000,00
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	3.671.914,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	1 Laporan	5.576.033,00
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	12.121.756,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	18 Laporan	14.919.947,00
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.348.309,00			1 Jenis	5.544.917,00
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	3.348.309,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	2 Laporan	5.544.917,00
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.479.246,00			1 Jenis	98.054.316,00
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	51 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	50 Paket	34.639.200,00
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	8 Dokumen	5.479.246,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	8 Dokumen	5.529.116,00
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang	5.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	3 Orang	57.886.000,00
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	237.091.773,00			10 Jenis	352.322.673,00
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	4 Paket	3.848.900,00

	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	1.591.526,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	4 Paket	2.100.000,00
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	4.579.013,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Paket	4.554.000,00
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	7.188.520,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Paket	8.307.732,00
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Dokumen	9.000.000,00
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material							
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	12 Paket	16.188.304,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Paket	18.085.041,00
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Laporan	6.000.000,00
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	192.544.410,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	70 Laporan	300.427.000,00
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	31.036.950,00			1 Unit	93.341.360,00
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	10 Unit	6.000.000,00
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	31.036.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	5 Unit	53.341.360,00
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	4 Unit	34.000.000,00
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	274.964.200,00			2 Jenis	247.573.400,00
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	28.964.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Laporan	25.573.400,00
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	246.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Laporan	222.000.000,00
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	47.395.616,00			35 Unit	79.695.850,00
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	25 Unit	32.659.216,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	25 Unit	52.510.850,00
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	11.080.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	25 Unit	3.765.000,00
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	3.656.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Unit	23.420.000,00
2,	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Tingkat Komsumsi Energi ; Tingkat Konsumsi Protein Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan Tingkat Komsumsi Protein</i>	109,52 ; 108,77 Persen 6,02 Persen 62 Gr/ Kapital Hari	423.200.234,00			108,33 ; 109,21 Persen 6,70 Persen	674.583.496,00
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	158.008.165,00			70 Persen	373.258.300,00
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia							

			<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>	4 Unit	11.639.954,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	4 Unit	82.729.140,00
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>	150 Keluarga	49.749.720,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	30 Keluarga	99.917.168,00
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>	1 laporan	14.628.177,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 laporan	29.674.632,00
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
			<i>Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal</i>	1 Laporan	28.359.260,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Laporan	49.753.19,00
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota							
			<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>	0 Unit	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	8 Unit	21.464.354,00
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan							
			<i>Informasi Stok Pangan</i>	12 Dokumen	10.249.757,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	12 Dokumen	18.821.627,00
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota							

			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	13 Laporan	2.032.793,00
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis							
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	1 Laporan	1.342.883,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	1 Laporan	13.143.903,00
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan							
			<i>Informasi Harga dan Pasokan Pangan</i>	12 Dokumen	35.159.162,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	12 Dokumen	40.019.357,00
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)							
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	1 Dokumen	6.879.252,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	15.702.207,00
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	215.394.992,00			23,66 Ton	221.347.934,00
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	13,45 Ton	199.944.992,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 Ton	199.997.934,00
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota							
			<i>Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota</i>	10 Ton	15.450.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	10 Ton	21.350.000,00

	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	49.797.077,00			108,33 ; 109, 21 Persen	79.977.262,00
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							
			<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	1 Dokumen	16.764.731,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	16.644.880,00
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	5 Laporan	27.061.766,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	5 Laporan	57.672.382,00
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun							
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	1 Laporan	5.970.580,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Laporan	5.660.000,00
3,	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan</i>	80,27 Persen	68.017.974,00			80,27 Persen	242.479.041,00
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tersedia</i>	1 Dokumen	9.095.609,00			1 Dokumen	5.121.833,00
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 Dokumen	9.095.609,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	5.121.833,00

	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	58.922.365,00			4 Jenis	237.357.208,00
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	12.132.280,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	164.981.288,00
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>	1 Laporan	8.359.583,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Laporan	9.052.733,00
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi							
			<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>	1 Dokumen	31.509.840,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	53.931.172,00
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	6.920.662,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	9.392.015,00
4,	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	21.788.530,00			-	31.703.492,00
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.788.530,00			50 Sampel	31.703.492,00
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							

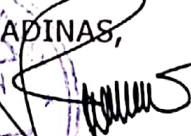
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	2.544.530,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	5.888.492,00
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>	1 Dokumen	19.244.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK	1 Dokumen	25.815.000,00
	J U M L A H					3.983.445.433,00			
						4.718.018.330,00			



Bab 4 PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2025 serta dengan penggalan masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Belopa, Juli 2024
KEPALADINAS,

MAKKAWARU, S.E, M.M
Pangkat: Pembina
NIP-19740707 2008 1 014

